LAPORAN

SISTEM KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2021

Publikasi ini diproduksi dengan dukungan keuangan dari Uni Eropa.
Isi dari publikasi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan dari Uni Eropa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pemilik hidup yang telah memberikan rahmat dan segala kemudahan sehingga tersusun dokumen "***Laporan Sistem Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2021***" dengan memfokuskan pada isu strategis yang berkembang dinamis di Kota Makassar serta sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Tahapan penyusunan yang telah dilewati dalam rangka penyelesaian dokumen ini tak luput dari banyaknya dukungan yang telah diberikan oleh beberapa pihak, sehingga sudah selayaknya ucapan terima kasih disampaikan kepada Uni Eropa melalui proyek SWITCH Asia Local Harvest yan diimplementasikan oleh Hivos telah memberikan dukungan penuh dan lintas *pemangku kepentingan* khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar yang telah terlibat sebagai wujud komitmen membangun Kota dengan *tagline* "**Peduliki' Salama'ki**'".

Tim menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan pada tahap selanjutnya. Akhirnya dengan penuh harapan dokumen ini dapat di implementasikan sesuai target yang telah ditetapkan sehingga memberikan manfaat serta memberikan kontribusi bagi program ketahanan pangan dan gizi pada skala perkotaan secara berkelanjutan.

Makassar, Februari 2022

Andi Irfanji

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

UCAPAN TERIMA KASIH iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Ruang Lingkup Wilayah Kota Makassar 4
C. Proses Penyusunan Dokumen 3

BAB II. SITUASI SISTEM PANGAN KOTA MAKASSAR 17

A. Kondisi Aktual 17
B. Analisa Situasi 20
C. Tantangan 28

BAB III. REKOMENDASI STRATEGI/AKSI 31

A. Aksi Yang Dapat Dilakukan 31
B. Pemetaan Tugas dan Fungsi OPD 64

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak atas dukungan dan kontribusi yang diberikan dalam penyusunan laporan ini, yaitu:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
- Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
- Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
- Dinas Perdagangan Kota Makassar
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar
- Dinas Kesehatan Kota Makassar
- Dinas Sosial Kota Makassar
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
- Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Makassar
- Dinas Pendidikan Kota Makassar
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
- UMKM Diskop Sulawesi Selatan (AKU MANDIRI)
- Universitas Hasanuddin (UNHAS)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu elemen penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya terkait TPB 2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki gizi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan tersebut diharapkan dapat terwujud pada tahun 2030. Walaupun beberapa kemajuan telah dibuat, namun hingga saat ini masih banyak orang yang menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Laporan Keadaan Ketahanan Pangan dan Gizi di Dunia *(The State of Food Security and Nutrition in the World)* yang dirilis oleh *Food and Agriculture Organization (FAO*) pada tahun 2020 menyebutkan sekitar 690 juta orang atau 8,9 persen populasi dunia masih dalam keadaan kelaparan.

Sistem pangan mengacu pada seluruh kegiatan serta pelaku yang terlibat dalam proses produksi/mendapatkan pangan, pengolahan, pengangkutan, konsumsi dan paska konsumsi pangan. Sistem pangan juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, serta berdampak pada kesehatan tubuh manusia. Sebagian besar sistem pangan di dunia saat ini berada dalam kondisi rapuh dan rentan. Hal ini dibuktikan dan dirasakan oleh jutaan orang diseluruh dunia, terutama selama krisis Covid 19, yang jika dibiarkan dapat mengancam banyak sektor seperti kesehatan, ekonomi bahkan keamanan. Dan seperti yang terjadi dalam banyak kasus, mereka yang miskin atau terpinggirkan merupakan kelompok yang paling rentan.

SWITCH Asia *Local Harvest*: mempromosikan konsumsi berkelanjutan dan merata serta sistem pangan lokal di Indonesia

didukung oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh Hivos dan mitranya: AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil), NTFP-EP *(Non Timber Forest Product-Exchange Program)* Indonesia dan WWF Indonesia. Proyek ini dilaksanakan di 8 provinsi (14 kabupaten) dan 5 kota di Indonesia selama periode empat (4) tahun terhitung sejak 1 Maret 2018.

Tujuan khusus dari proyek ini adalah untuk merangsang pergeseran pola konsumsi yang signifikan terhadap produk makanan yang berkelanjutan dan bersumber secara etis di Indonesia melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran konsumen tentang dampak pilihan makanan mereka; peningkatan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produsen pangan - termasuk perempuan dan masyarakat adat - untuk menembus pasar; lingkungan kebijakan yang menguntungkan untuk penyerapan praktik Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di sektor pangan. Salah satu bidang hasil proyek ini meliputi dukungan dan adopsi dari pemerintah nasional dan daerah tentang kebijakan dan pedoman untuk mempromosikan produk pangan hijau, sehat, adil dan lokal.

Forum/*platform* multi pihak merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam rangka memperkuat kerjasama dan sinergi untuk mendukung sistem pangan di Kota Makassar yang berkelanjutan. *Platform* pemangku kepentingan lokal mencakup, tetapi tidak terbatas pada lembaga pemerintah, perwakilan produsen, UMKM dan pengecer, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perwakilan konsumen, yang akan berbagi pengalaman dan mendiskusikan potensi sinergi dalam mempromosikan konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam sistem pangan.

Dalam kerangka implementasi proyek *Local Harvest*, rangkaian kegiatan diskusi multi-pihak telah dilakukan dalam rangka memetakan

isu dan mendapatkan masukan bagi penyusunan strategi untuk memperkuat sistem pangan Kota Makassar dan telah melahirkan beberapa dokumen yang merupakan rangkuman dari rangkaian diskusi yang telah dilaksanakan dan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penyusunan kebijakan pangan dan gizi pada skala perkotaan. Rekomendasi yang akan dijadikan rujukan pemerintah kota untuk melanjutkan penyusunan dokumen strategi daerah berupa rencana aksi daerah pangan dan gizi sebagai bagian dari wujud komitmen bersama untuk keberlanjutan system pangan yang berkeadilan pada wilayah perkotaan, selain itu juga mendukung upaya percepatan penurunan *stunting* di Kota Makassar.

B. Ruang Lingkup Wilayah Kota Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Secara administrasi, 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan di Kota Makassar.

Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan Pulau-pulau Sangkarrang, atau disebut juga Pulau- Pulau Pabbiring, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-lumu, Pulau

Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (gusung) dan Pulau Kayangan (terdekat). Wilayah Kepulauan Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut.

Peta Administrasi Kota Makassar

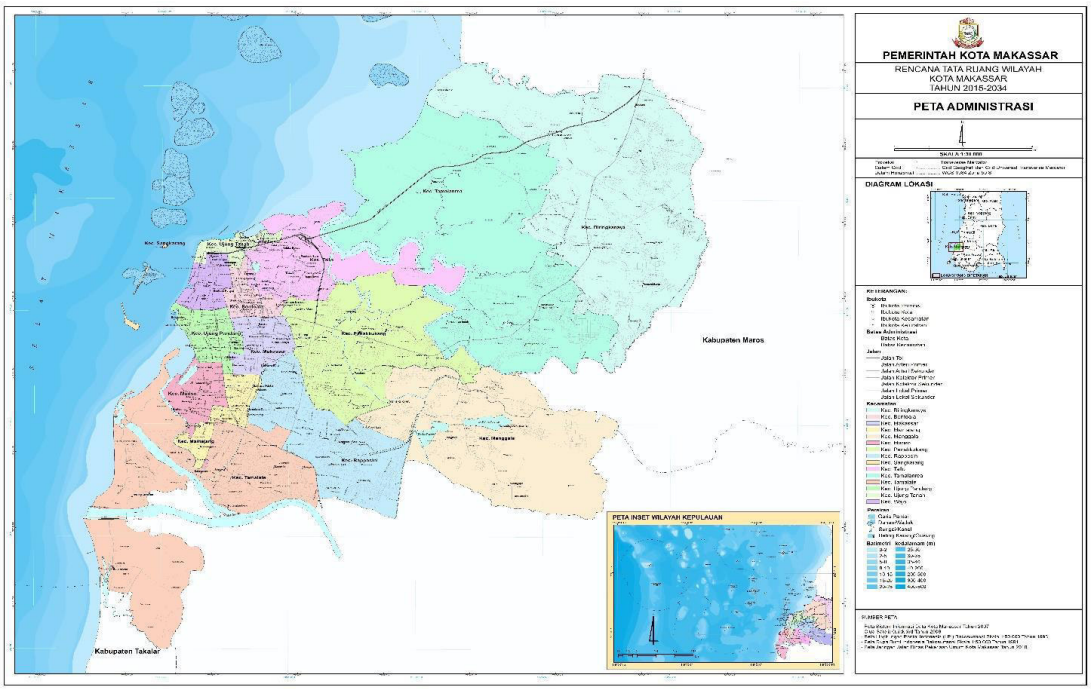

Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang RT dan RW Kota Makassar 2015-2034

Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan dengan luasan 175,77 km2. Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, berikut ini deskripsi wilayah tiap kecamatan yaitu :

1. **Kecamatan Biringkanaya**

   Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas di antara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar, luasnya 48,22 km2 atau sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros.

Kecamatan Biringkanaya merupakan Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Kota Makassar yakni 209.048 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 4.335 jiwa/km2. Topografi wilayah kecamatan ini mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-19 m di atas permukaan laut. Potensi sumber daya alam yang ada di kecamatan ini antara lain di sektor pertanian dan perikanan. Secara umum, Pantai Kecamatan Biringkanaya sebagian besar merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi *mangrove* serta merupakan pantai yang landai. Hanya sebagian kecil pantai ini tergolong cadas. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, namun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi dari Sungai Mandai.

Peta Inset Wilayah Kepulauan Kota Makassar

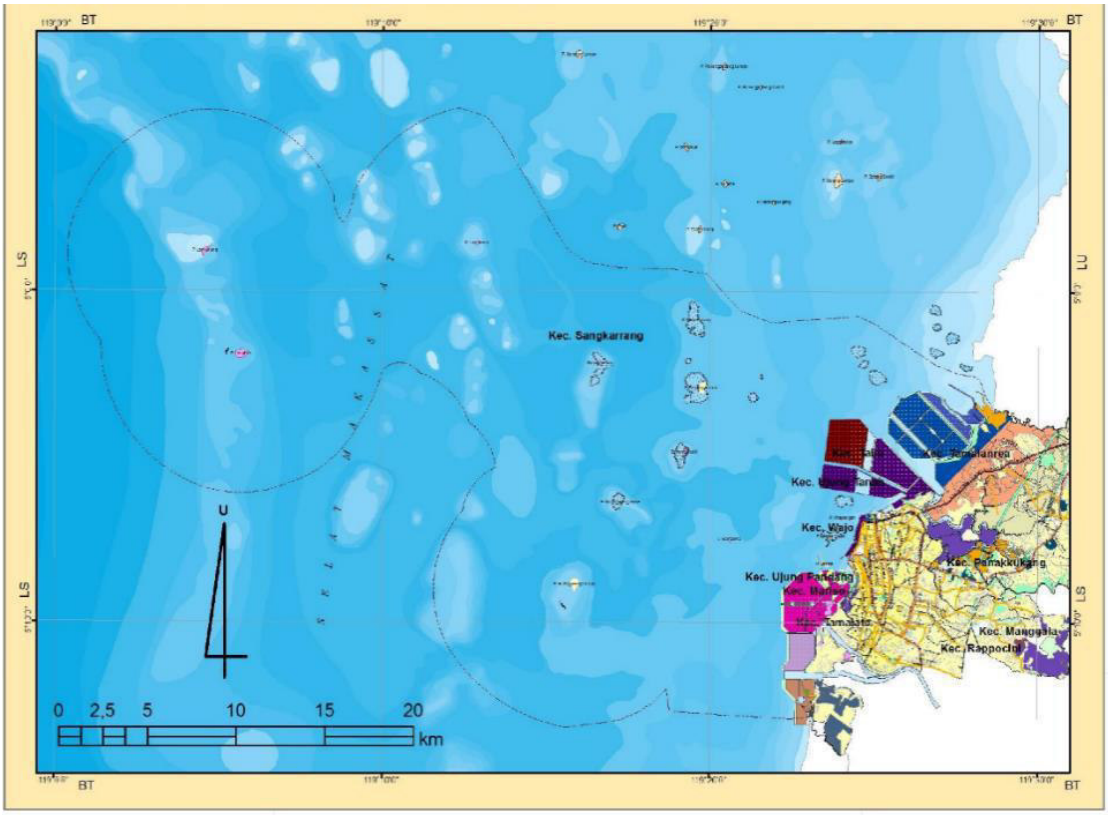

2. **Kecamatan Bontoala**

Luas wilayah Kecamatan Bontoala adalah 2,10 km2 atau 1,19% dari keseluruhan luas Kota Makassar yang terdiri atas 12 kelurahan. Kecamatan Bontoala termasuk dalam kategori kecamatan terpadat (urutan ke-4) yakni 26.189 jiwa/km2 dan jumlah penduduk 54.996 jiwa tahun 2020. Topografi di kecamatan ini dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut, sebagian daerah di kecamatan ini berpotensi banjir utamanya daerah yang dialiri anak Sungai Tallo. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diperuntukkan sebagai pemukiman.

3. **Kecamatan Makassar**

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar yakni 32.566 jiwa/km2, dengan jumlah penduduk 82.067 jiwa tahun 2020 dan luas wilayah 2,52 km2 atau 1,43% dari keseluruhan luas wilayah Kota Makassar. Penggunaan lahan di Kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan dan perkantoran. Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam.

4. **Kecamatan Mamajang**

Luas wilayah Kecamatan Mamajang adalah 2,25 km2 atau 1,28% luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan jumlah penduduk sebanyak 56.049 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 24.911 jiwa/km2. Topografi wilayah yang merupakan dataran rendah dengan elevasi 1-5 m di atas permukaan laut yang memungkinkan pengembangan lahan kecamatan sebagai kawasan pemukiman. Kecamatan Mamajang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laju infiltrasi tinggi sehingga potensi ancaman banjir sangat kecil.

5. **Kecamatan Manggala**

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Luas wilayah sebesar 24,14 km2 atau sekitar 13,73% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan jumlah penduduk sebanyak 146.724 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 6,078 jiwa/km2.

Topografi wilayah kecamatan ini ber-*relief* dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan elevasi 2-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan untuk pertanian sawah dan tegalan/kebun merupakan yang terluas dibandingkan kecamatan lain. Pada sektor perikanan darat memiliki potensi yang kecil, namun di sektor peternakan kecamatan ini memiliki populasi ternak besar dan kecil dalam jumlah yang sangat besar.

6. **Kecamatan Mariso**

Kecamatan Mariso merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling kecil yakni hanya 1,04% dari luas wilayah Kota Makassar atau sekitar 1,82 km2, Jumlah penduduk di Kecamatan Mariso sebanyak 57.426 jiwa tahun 2020 dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 31.553 jiwa/km2. Potensi sumber daya alam di Kecamatan ini yaitu sub sektor perikanan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sebagian besar diperuntukkan pada pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. Untuk potensi bencana alam di kecamatan ini berupa abrasi pantai.

7. **Kecamatan Panakkukang**

Kecamatan Panakkukang merupakan kecamatan yang terletak ditengah-tengah Kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 17,05 km2 atau sekitar 9,70% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, jumlah penduduk sebanyak 139.590 jiwa tahun 2020 dengan

kepadatan penduduk 8.187 jiwa/km2. Topografi wilayahnya memiliki elevasi 1-13 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman.

8. Kecamatan Rappocini

Jumlah penduduk di Kecamatan Rappocini sebanyak 144.587 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 15.665 jiwa/km². Penggunaan lahan di kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. Luas wilayahnya 9,23 km2 atau sekitar 5,25% dari luas keseluruhan Kota Makassar. Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 2-6 m di atas permukaan laut sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan pemukiman.

9. Kecamatan Tallo

Kecamatan Tallo merupakan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak (15 kelurahan), dengan luas wilayahnya 5,83 km2 atau 3,32% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Jumlah penduduk merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar kelima dengan 144.977 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk sebanyak 24.867 jiwa/km². Topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan elevasi 1- 3 m di atas permukaan laut. Potensi bencana di Kecamatan Tallo berupa banjir, karena kecamatan ini merupakan Daerah Aliran Sungai Tallo yang berpotensi terjadinya luapan Sungai Tallo ke pemukiman sekitarnya. Potensi pencemaran dan pendangkalan pada muara Sungai Tallo sebagai akibat limbah buangan industri yang tidak terkontrol pada anak-anak Sungai Tallo. Pantai Kecamatan Tallo merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan vegetasi mangrovenya sangat minim serta

merupakan pantai yang landai. Pada bagian barat pantai kecamatan ini sudah ada kegiatan reklamasi pantai sekitar sepanjang 200 m sebagai lahan kegiatan industri pengolahan kayu. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat sedimentasi di muara Sungai Tallo. Ditinjau dari pemanfaatannya maka pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal dan pemukiman pantai (pinggir muara Sungai Tallo) dan pantai paling barat Kelurahan Tallo.

10. Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea adalah Kecamatan terluas kedua sesudah Kecamatan Biringkanaya, dengan luas 31,84 km2. Jumlah penduduk 103.177 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 3.240 jiwa/km2. Topografi wilayah kecamatan dimulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1 – 22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sangat bervariasi mulai permukiman, perkantoran, pertokoan hingga gedung pendidikan. Salah satunya adalah Universitas Hasanuddin, sebagai universitas terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir Sungai Tallo sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar tepi sungai memiliki tambak. Selain di tepi Sungai Tallo, kawasan tambak juga ditemukan di sisi utara kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai Kecamatan Tamalanrea merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Namun demikian terdapat pula Pantai Cadas di sebelah selatan Lantebung (Kelurahan Parang Loe).

11. Kecamatan Tamalate

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Tamalate yang tersebar pada 10 kelurahan, dengan jumlah penduduk yakni 180.824 jiwa tahun 2020. Luas wilayah kecamatan ini 20,21 km2 dengan kepadatan penduduk 8.947 jiwa/km2. Topografi wilayah kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi ketinggian 1-6 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Di sektor pertambangan, bahan galian C terutama pasir, batu dan sirtu terdapat di Kelurahan Mangasa. Kecamatan Tamalate mempunyai pantai terpanjang di antara kecamatan-kecamatan yang mempunyai pantai di Kota Makassar, yaitu sepanjang sekitar 10 km (panjang pantai Kota Makassar sekitar 35 km). Dengan panjang pantai 31,25% dari panjang pantai Kota Makassar, dengan pantai berpasir dengan lebar pantai sekitar 10-30 meter serta kelandaiannya 3%. Secara umum pantai ini dapat dikatakan relatif stabil sekalipun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi pasir halus dari Sungai Jeneberang maupun dari arah selatan. Dengan kondisi pantai tersebut, maka sebagian besar pantai ini digunakan sebagai areal pariwisata pantai.

12. Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan yang dijadikan sebagai tempat area publik karena adanya Pantai Losari yang menjadi ikon Kota Makassar. Luas wilayahnya 2,63 km2 atau 1,50% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Kecamatan Ujung Pandang memiliki jumlah penduduk terendah yakni 24.526 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk berkisar 9.325 jiwa/km2. Pantai Kecamatan Ujung Pandang umumnya juga sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, khususnya pada Daerah Rekreasi Pantai Losari dan sekitarnya.

Hanya sebagian lokasi di sebelah utara pantai kecamatan ini merupakan kompleks perhotelan, serta dermaga penyeberangan Kayu Bangkoa ke Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan dan pulau-pulau lainnya di wilayah Kota Makassar. Selain itu, Kecamatan Ujung Pandang juga berpotensi terhadap pencemaran air laut dan air tanah karena penggunaan lahan yang lebih diarahkan pada pembangunan hotel. Selain itu juga restoran merupakan usaha paling besar memberikan kontribusi terhadap pencemaran air di kecamatan ini.

13. Kecamatan Ujung Tanah

Kecamatan Ujung Tanah memiliki luas wilayahnya 4,40 km2 atau 2,5% dari luas keseluruhan Kota Makassar, dengan jumlah penduduk 35.789 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 8.134 jiwa/km2. Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini terdiri atas dua kelompok, yakni masyarakat perkotaan dan masyarakat nelayan dimana potensi perikanan yang sangat besar. Guna menjaga kestabilan pantai di Kecamatan Ujung Tanah, sebagian besar sudah mengalami pengerasan dengan tembok yang berfungsi sebagai pelindung pantai. Hal ini mengingat pantai tersebut mempunyai nilai penting karena perairan pantainya dimanfaatkan untuk pangkalan pendaratan ikan (TPI Paotere), pelabuhan dan docking kapal TNI AL, Pelabuhan Pertamina Instalasi Makassar dan Bogasari. Kecamatan ini berada pada wilayah pesisir bagian utara Kota Makassar.

14. Kecamatan Wajo

Salah satu kecamatan yang terletak di pesisir barat Kota Makassar dan wilayah pantainya merupakan kompleks Pelabuhan Soekarno-Hatta (Pelabuhan Umum dan Peti Kemas), dengan luas wilayah 1,99 km2 atau 1,13% dari luas keseluruhan wilayah Kota. Jumlah penduduk di Kecamatan Wajo 29.972 jiwa tahun 2020 dengan

kepadatan 15.061 jiwa/km2. Secara topografi, kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut sehingga berpotensi terjadi abrasi.

15. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ujung Tanah. Luas wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebesar 1,54 km2 atau sekitar 0,88% dari luas wilayah kota. Jumlah penduduk di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebanyak 14.125 jiwa tahun 2020 dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 9.172 jiwa/km2. Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini yaitu masyarakat nelayan yang mendiami 11 pulau di kecamatan ini. Selain potensi perikanan yang sangat besar, potensi pariwisata bawah air dapat menjadi andalan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan 5 pulau yang menyajikan keindahan bawah laut yang kaya akan keragaman hayatinya sebagai suatu poin menarik bagi para wisatawan.

C. Proses Penyusunan Dokumen

Koordinasi, Konsultasi, *Meeting* dan *Workshop*

Koordinasi, pengumpulan data dan pertemuan dilakukan selama periode bulan September 2021 - Januari 2022.

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi bidang pangan perkotaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini khususnya di Kota Makassar pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah kota yang melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akedemia (perguruan tinggi/organisasi profesi), mitra pembangunan, dan media massa. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi. Dalam melakukan pelaksanaan ada mekanisme kerja, yaitu:

1. Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan

2. Pertemuan penentuan prioritas di daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan
3. Tim koordinasi yang melibatkan sektor terkait lainnya.

Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan, sebagai langkah awal untuk menjalankan serangkaian proses akan dibentuk tim khusus untuk memperkuat semua peran sektor diantaranya: tata kelola pengorganisasian forum koordinasi di daerah yang dapat disesuaikan dengan pengorganisasian lainnya, atau membentuk organisasi atau forum baru sesuai dengan kebutuhan. Forum Koordinasi ini adalah wadah koordinasi gabungan dan/atau sekretariat bersama antara pengarah dan tim teknis dengan forum koordinasi yang sudah ada.

Penyusunan tim Koordinasi disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Struktur organisasi atau susunan forum pengarah dan forum teknis tidak bersifat mengikat dan dapat disesuaikan,

1) Pembentukan/pengoptimalan tim koordinasi/forum yang telah ada akan disesuaikan dengan tupoksi di masing-masing OPD terkait
2) Membuat *action plan system* pangan di Kota Makassar
3) Hasil dari penguatan akan dijadikan bahan rekomendasi penyusunan dokumen pangan dan gizi

Susunan keanggotaan forum koordinasi terdiri dari pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Forum Pengarah

   Forum pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan OPD yang memberikan arahan terhadap Rencana Aksi Daerah-Pangan dan Gizi (RAD-PG) mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi.

   Susunan forum pengarah terdiri dari :

a. Penanggung jawab : kepala daerah/wakil kepala daerah
b. Ketua : sekretaris daerah
c. Sekretaris : biro atau bagian yang bertanggung jawab terhadap urusan ekonomi atau sosial
d. Anggota : pimpinan OPD yang terdiri dari instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kependudukan dan keluarga berencana, dan pengawasan obat dan makanan.

2. Forum Teknis

Forum teknis terdiri dari ketua, sekretaris, OPD dan pemangku kepentingan lainnya (non-pemerintah) yang terkait dalam proses RAD-PG, yaitu :

a. Ketua : pimpinan OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan perencanaan pembangunan daerah
b. Sekretaris : pimpinan OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan kesehatan, pertanian, dan atau ketahanan pangan
c. Anggota : kepala bidang terkait dari instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, data statistika, agama,——komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/cipta karya/perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan

keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, pemberdayaan perempuan, perhubungan, usaha kecil menengah, energi dan kelistrikan, bulog, instansi milik pemerintah lainnya serta mitra non-pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

anggota forum teknis dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan strategi ketahanan pangan dan gizi untuk memudahkan pembagian kerja. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing OPD pada proses penyusunan dokumen, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Adapun komposisi pemangku kepentingan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. **Pokja Ketersediaan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah.

   Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; pertanian; pangan; kelautan dan perikanan; sosial; perindustrian dan usaha kecil menengah; pengawasan obat dan makanan; pemberdayaan masyarakat desa; kependudukan dan KB; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang pertanian.

2. **Pokja Keterjangkauan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan

dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan.

Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang pertanian; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; kependudukan dan Keluarga Berencana (KB); sosial; penanggulangan bencana; perdagangan; Badan Urusan Logistik (BULOG); perhubungan; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang ketahanan pangan.

3. **Pokja Pemanfaatan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi.

   Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; pertanian; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; komunikasi dan informasi; perindustrian; perdagangan; BULOG; pemberdayaan masyarakat desa; pendidikan; agama; pengawasan obat dan makanan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang kesehatan.

4. **Pokja Kelembagaan** memiliki tugas untuk menyusun **rekomendasi** aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi.

   Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang perencanaan dan pembangunan daerah; pertanian; statistika; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat desa; sekretariat daerah (biro kesra, biro ekonomi). Koordinator pokja disarankan instansi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB II
SITUASI SISTEM PANGAN KOTA MAKASSAR

A. Kondisi Aktual

Kondisi aktual sistem pangan Kota Makassar dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Belum terpenuhinya tingkat keanekaragaman pangan yang tersedia
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penganekaragaman, konsumsi dan keanekaragman pangan
- Masih kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga
- Ketersediaan pangan masih didominasi pangan nabati
- Derajat kesehatan masyarakat belum optimal
- Angka kematian ibu dan bayi masih terjadi
- Prevalensi *stunting* masih menjadi masalah serius
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku sehat menjaga lingkungan
- Harga barang pokok dan bahan penting lainnya sangat *fluktuatif*
- Belum optimalnya penyelenggaraan kesejehteraan sosial
- Penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan.

Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar memiliki program strategi daerah yaitu terwujudnya rumah tangga

tahan pangan yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman yang mempunyai tujuan:

- Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka pelayanan penyediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang berbasis sumber daya lokal.
- Menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi pangan di sektor Lorong-lorong melalui penguatan Usaha Kecil Menengah (UKM) pangan
- Melakukan pengawasan dan koordinasi pengendalian dan pengelolaan ketersediaan pangan di sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
- Meningkatkan kapasitas kelompok tani pertanian perkotaan beserta kelompok wanita tani dan sarana prasarana pendukung
- Meningkatkan partisipasi kaum perempuan sebagai penyedia utama pangan dalam rumah tangga melalui kelompok wanita tani berbasis Lorong dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan.

Penajaman program tersebut di bagi menjadi 3 kelompok strategi yaitu

1. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

- Pembinaan Kelompok Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- Analisa Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah kebutuhan Pangan
- Penyusunan Neraca Bahan Makanan
- Pembinaan Pangan Produktif pada Lahan Pekarangan Rumah

2. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- Pembinaan dan Pengawasan Produk Pangan yang Berbahaya bagi Konsumen

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha Ekonomi Pangan Perkotaan (LUEPP)

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- Updating Sistem Informasi Harga Pangan.

Kecukupan konsumsi dipengaruhi oleh ketahanan pangan di tingkat keluarga dan pola asuh, sementara itu penyakit infeksi dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan seperti imunisasi, kualitas lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu, faktor yang mendasari faktor langsung dipengaruhi oleh akar masalah antara lain pendidikan, kelembagaan, politik dan ideologi, kebijakan ekonomi, sumber daya lingkungan, teknologi, dan penduduk.

Sedangkan untuk meningkatkan **ketahanan pangan** diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak berfungsi, maka pemerintah perlu melakukan tindakan intervensi. Upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dapat berupa jaminan sosial/bantuan/subsidi, kebijakan harga pangan, kebijakan impor/ekspor, kebijakan cadangan pangan pemerintah. Untuk meningkatkan keterjangkauan perlu dilakukan intervensi dalam aspek distribusi berupa penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran pangan untuk keadaan darurat dan operasi pasar untuk pengendalian harga pangan. Sementara itu dalam aspek konsumsi dapat dilakukan pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan/gizi buruk, pemberian bantuan tunai untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan.

Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menggambarkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan yang cukup dan aman. Mengatasi

kemiskinan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang aman, dan bergizi, namun selain itu juga diperlukan adanya pola asuh dan pemberian makan yang tepat yang ditentukan oleh pengetahuan orang tua, terutama ibu. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah akses terhadap layanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui program jaminan kesehatan sosial, sanitasi yang baik yang dapat menurunkan kejadian infeksi, dan lingkungan yang aman. Apabila hal ini berjalan dengan baik dampaknya sensitif terhadap perbaikan gizi.

Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak.

B. Analisa Situasi

Target FAO *(Food and Agriculture Organization)*: mencapai nol kelaparan dunia pada 2030 dan prevalensi *stunting* dan *wasting* balita di ASEAN 2020 masing-masing 27,40% dan 8,2 %, lebih tinggi dari rata-rata global *(Global Nutrition Report*, 2020), sedangkan Indonesia untuk kedaulatan pangan prioritas ke-7 dalam Nawa Cita (9 program utama)-PP No.2/2015 (RPJMN 2015-2019) dan dikuatkan pula oleh PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk: membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi untuk memberikan arah dan rekomendasi bagi para

pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

Analisis situasi pangan dan gizi di Kota Makassar disajikan berdasarkan empat jenis indikator: (1) aspek akses pangan, (2) aspek ketersediaan pangan, (3) aspek keterjangkauan pangan, (4) aspek pemanfaatan pangan.

1. Aspek Akses Pangan.

Aspek akses pangan dinilai dengan pendekatan perkembangan harga pangan komoditas beras. Data diperoleh dari hasil survei harga di seluruh kecamatan setiap bulan oleh Petugas pendata harga pangan Kota Makassar.

2. Aspek Ketersediaan Pangan

Pada periode 2015-2020, produksi pangan strategis cenderung meningkat, peningkatan tertinggi terjadi pada komoditas bawang merah yang mengalami peningkatan sebesar 9,6% diikuti oleh telur ayam ras (6,1%), daging sapi (4,4%), cabai rawit (3,2%) dan beras (0,6%). Penurunan produksi terjadi untuk komoditas cabe besar dan daging ayam ras masing-masing menurun sebesar 1,4% dan 11%. Penurunan ini diduga disebabkan oleh dampak pandemi COVID 19 yang menyebabkan daya beli yang berdampak pada respon produsen daging ayam ras untung mengurangi produksi sesuai penurunan permintaan pasar.

3. Aspek Keterjangkauan Pangan

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan

meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, dalam pemenuhannya harus memperhatikan keberagaman jenis (diversifikasi) dan jumlah pangan yang dikonsumsi masyarakat sesuai anjuran, untuk itu telah ditetapkan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya.

4. Aspek Pemanfaatan Pangan

Hasil dari pemanfaatan/penyerapan pangan merupakan gambaran dari status gizi seseorang terutama pada anak-anak.

Konsumsi pangan yang beragam sangat penting oleh karena tubuh manusia memerlukan beragam jenis zat gizi yang bersumber dari berbagai jenis makanan dan minuman. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat yang lebih luas baik wilayah, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Gambaran kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah tercermin dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Adanya beberapa hambatan diantaranya:

a. Masih rendahnya pendapatan dan daya beli sebagian masyarakat. Selain itu masih terbatasnya ragam komoditas pangan yang ditunjukkan dengan sumber karbohidrat masyarakat yang masih didominasi oleh beras. Akses pangan yang rendah akibat menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh

kemiskinan dan stabilitas harga pangan yang seringkali terganggu baik oleh kondisi alam maupun pasar.

b. Masih adanya sikap dan kebiasaan masyarakat, yang belum mengutamakan kandungan gizi dalam memilih pangan yang dikonsumsi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan/ pengetahuan masyarakat terutama ibu atau pengasuh anak dan usia menikah yang terlalu muda.

c. Kebijakan dan program terkait perbaikan gizi masih terfragmentasi akibat kurangnya koordinasi dan belum dilaksanakannya pendekatan multi-sektor.

Indikator dan Target Pangan dan Gizi

No	Indikator Bidang Pangan (*Intermediateoutcome)*	Nasional		Kota Makassar			
		Baseline	*Target 2024*	Baseline	Target Estimasi		
					2022	2023	2024
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,4 b)	95,2	78,8	80	82	85
2	Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/kapita/hari)	2.121 b)	2,1				
3	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	62,9 b)	57	71,5	N/A	N/A	N/A
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU)	6,7 b)	5	1,56	1,46	1,36	1,26
5	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES)	5,8 b)	4		N/A	N/A	N/A
6	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	50,7 c)	62	108,78	111,58	111,91	113,73
7	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	13,2 b)	14,6				

No	Indikator Bidang Pangan (*Intermediateoutcome)*	Nasional		Kota Makassar			
		Baseline	*Target 2024*	Baseline	Target Estimasi		
					2022	2023	2024
8	Konsumsi protein asal ternak (kg/kapita/tahun)	10,9 b)	11				
9	Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari)	244,3 b)	316,3		N/A	N/A	N/A
10	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	94 a) *)	85-95				
11	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (%penerima BPNT)	48 ton **)	100%	0	N/A	N/A	N/A
12	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76 (BPOM, 2019)	86				
				Baseline	Target		
1	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGBI) 2019)	14		15,8	13,5	11,2
2	Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas , 2018)	7		N/A	N/A	N/A
3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,8 (Riskesdas , 2018)	21,8		N/A	N/A	N/A

Tren Analisis Prevalensi *Stunting* Balita Kota Makassar:
Model Kuadratik

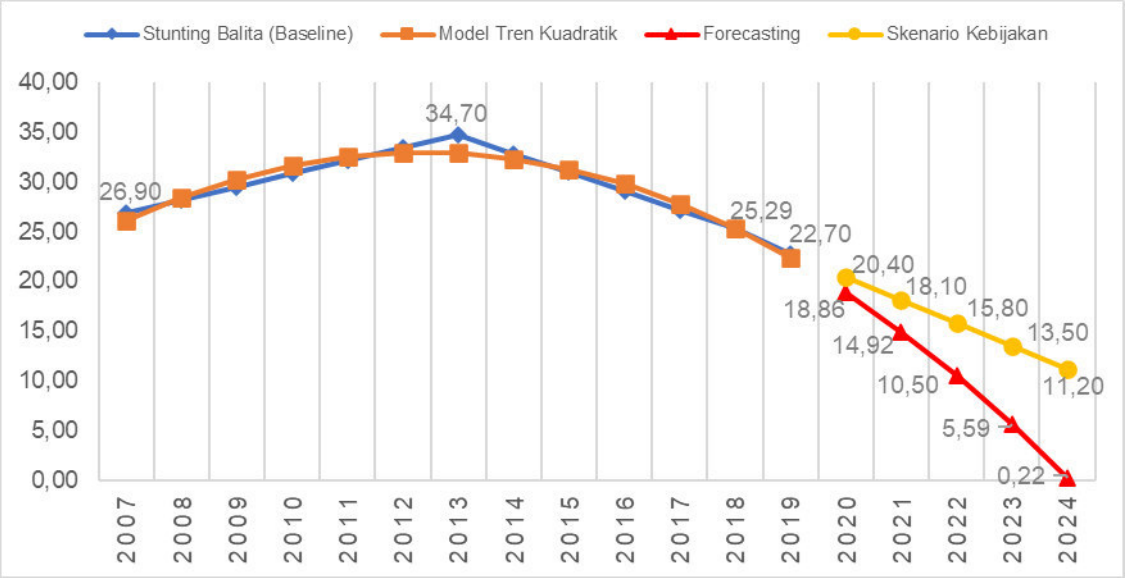

Sumber: diolah dari data Riskesdas 2018 dan SSGBI 2019

Pendekatan Kunci

Peningkatan status gizi masyarakat dilaksanakan melalui ketersediaan, akses, konsumsi dan keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat yang didasari dengan pemihakan kebijakan yang konstruktif melalui peningkatan penyediaan fasilitas infrastruktur layanan dasar memerlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas bidang dan lintas program serta kemitraan dengan berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu strategi implementasinya adalah sebagai berikut:

a. **Penguatan sumberdaya dan lembaga pemberi pelayanan kesehatan di garis terdepan *(frontline unit)*** melalui perbaikan standar dan penguatan kinerja pelayanan.

b. **Peningkatan aksesibilitas pangan di wilayah perkotaan rawan pangan dan bagi keluarga miskin,** melalui berbagai intervensi khusus maupun berbasis pemberdayaan masyarakat. Penyebab kemiskinan lekat pada karakteristik lain yang mempengaruhi status gizi dan kesehatan. Mereka yang miskin umumnya mempunyai pendidikan yang lebih rendah, kurang terpapar dan atau kurang tepat memahami pesan - pesan kesehatan yang baik, pangan yang aman, rendahnya akses terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat, rendahnya akses terhadap promosi dan pelayanan kesehatan serta keluarga berencana. Oleh karena itu, agar upaya multi sektor dapat memberikan hasil yang optimal, upaya-upaya tersebut perlu difokuskan pada kelompok miskin dan hampir miskin, dengan tidak melupakan upaya untuk kelompok masyarakat lainnya.

c. **Peningkatan diversifikasi gizi berbasis pangan lokal,** melalui penelitian terapan dan pengembangan tekhnologi tepat guna.

d. **Sensitif Gender,** Penyelesaian pendidikan hingga tingkat menengah oleh anak perempuan telah terbukti menjadi salah satu kontributor terbesar untuk menurunkan *stunting* di Bangladesh, Indonesia (Semba, 2008) dan Nepal (Crum, 2012). Meskipun mekanisme yang menjelaskan hubungan ini belum jelas (Wachs, 2008), hal ini dapat terjadi dikarenakan perempuan yang sekolah cenderung untuk tidak hamil pada usia remaja, sehingga tingkat

kehamilan remaja lebih rendah. Selain itu tingkat pendidikan anak perempuan juga berkontribusi meningkatkan status gizi sebelum menikah, yang semuanya berkontribusi untuk meningkatkan berat lahir (UNSCN, 2010). Produksi pangan lokal dan pengolahan, terutama oleh petani kecil dan keluarga petani harus diperkuat dan memberikan perhatian khusus untuk pemberdayaan perempuan, sesuai dengan rekomendasi ICN2 nomor 9. Usia legal untuk menikah bagi perempuan juga perlu ditingkatkan menjadi 18 tahun.

e. **Kesetaraan,** menyebutkan tanggung jawab masing-masing OPD terkait pemenuhan dan peningkatan status pangan dan gizi masyarakat. Tanggung jawab tersebut telah dibagi secara setara berdasarkan peran-peran yang telah melekat pada OPD tersebut. Masyarakat juga diminta untuk memiliki peran aktif dalam memenuhi dan meningkatkan status pangan dan gizi keluarga.

f. **Peningkatan efektifitas pelaksanaan monitoring Status gizi**, memastikan setiap balita termonitor status gizinya melalui posyandu/surveylance berbasis masyarakat ataupun PAUD yang telah tersebar di tingkat basis. Untuk memastikan bahwa perkembangan pendekatan terintegrasi mencapai tujuan, monitoring secara berkala terhadap cakupan berbagai intervensi yang dilakukan sangat penting. Sistem informasi rutin yang sudah ada perlu diperkuat dan dilakukan survei berkala untuk

mengetahui cakupan yang dicapai. Kegiatan pengumpulan data dan informasi harus dilakukan oleh pemerintah kota dan hasil yang diperoleh disampaikan kepada perangkat daerah dan kecamatan dan kelurahan sebagai bahan umpan balik. Hal yang sama juga dilakukan di tingkat provinsi dan pusat, umpan balik disampaikan kepada kota oleh provinsi dan kepada provinsi oleh pusat dan kepada multi sektor/OPD lainnya. Seluruh hasil yang diperoleh tersebut dipergunakan untuk perbaikan kegiatan berikutnya.

g. **Kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah,** mempertimbangkan penyesuaian dengan RPJMD dan peraturan-peraturan pemerintah yang lebih tinggi lainnya. Penyesuaian ini dilakukan antara lain dalam hal pembagian wewenang dan sumber pendanaan antar OPD serta penetapan target-target pencapaian. Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian RPJMD dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan RPJMD maupun peraturan-peraturan lain di atasnya.

C. Tantangan Ketahanan Pangan di Kota Makassar

1. Peningkatan produksi sebagian komoditas pangan, khususnya karbohidrat/berbagai sumber karbohidrat lainnya di daerah penyangga atau daerah pulau lain belum bisa mengimbangi kenaikan konsumsi dan kebutuhan akan komoditas ini. Masih tingginya ketergantungan terhadap impor beras nasional dapat

mengancam ketahanan pangan selama krisis akibat pandemi COVID-19.

2. Kemiskinan dan relatif tingginya harga pangan terhadap pendapatan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan akses pangan.
3. Pola konsumsi sebagian besar masyarakat perkotaan masih kurang ideal, dengan karbohidrat masih mendominasi asupan kalori seperti beras atau gandum, sementara konsumsi protein, buah-buahan, dan sayuran masih belum mencukupi; serta peningkatan konsumsi makanan olahan dan siap saji di perkotaan maupun perdesaan.
4. Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas terus meningkat di kalangan anak usia 6 sampai 12 tahun, remaja, dan orang dewasa. Bukti juga menunjukkan bahwa defisiensi *mikronutrien* banyak terjadi meski data yang representatif belum dikumpulkan selama bertahun- tahun. Krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial menjadi tantangan kuat bagi kemajuan yang telah dicapai selama ini.

Kota Makassar menghadapi banyak tantangan yang sama dengan kota-kota besar dan berkembang lainnya. Tantangannya beragam mulai dari masalah lingkungan, sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, sistem pangan perkotaan, *stunting* dan gizi lainnya. Selain itu, tingkat kemiskinan di Kota Makassar pada tahun 2020

mencapai 4,54% (RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026). Kondisi ini sebagai dampak Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi yang terjadi sejak Tahun 2020.

Dampak kemiskinan tersebut melebar ke permasalahan gizi, permasalahan tersebut diatas dapat menimbulkan kekhawatiran serius karena menggangu tumbuh kembang anak, kemampuan belajar serta produktifitas bekerja masyarakat. Padahal, terdapat tujuan pembangunan nasional dengan tercapainya status gizi masyarakat yang optimal sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan pangan dan gizi. Pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, dan perlindungan anak. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal.

BAB III
REKOMENDASI STRATEGI/AKSI

A. Aksi Yang Dapat Dilakukan

Berdasarkan hasil diskusi, pemangku dan pelaku kepentingan sistem pangan Kota Makassar memberikan rekomendasi aksi yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi diantaranya:

- Peningkatan keanekaragaman pangan yang tersedia
- Peningkatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga
- Peningkatan ketersediaan pangan hewani
- Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat
- Penurunan angka kematian ibu dan bayi
- Percepatan penurunan *stunting* dengan strategi daerah
- Peningkatan perilaku sehat dan menjaga lingkungan Kesehatan masyarakat
- Stabilitas dan pengendalian harga pangan
- Pengembangan jaring pengamanan sosial pangan
- Penguatan kelembagaan pangan.

Rencana Strategis (Renstra) OPD berikut ini program untuk mendukung sistem pangan perkotaan meliputi:

a. Dinas Pendidikan, yaitu:

1) Program Pendidikan Anak usia Dini
2) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

b. Dinas Kesehatan, yaitu :

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
6) Program Pemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
7) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita
8) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
9) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

c. Dinas Pekerjaan Umum, yaitu :

1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
2) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3) Program Pengendalian Banjir
4) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Insfrastruktur Kawasan Permukiman.

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu :

1) Program Pengembangan Perumahan

2) Program Lingkungan Sehat dan Perumahan

3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

e. Dinas Sosial, yaitu:

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu:

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

4) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

5) Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

h. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dinas Perikanan, yaitu:

1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

3) Program Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian)
5) Program Peningkatan Produksi Pertanian
6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
9) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian

i. Diperindagkop UKM, yaitu:

1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

j. Bappeda, yaitu:

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pada Pelaksanaan Workshop Keberlanjutan Sistem Pangan, ada 3 poin kunci yang menjadi fokus:

- Isu **ketahanan pangan** dan gizi menguat di perkotaan tidak terkecuali di Kota Makassar, terutama setelah munculnya Covid-19 yang berefek multi-dimensional
- Permasalahan ketahanan pangan tidak terlepas dari tiga pilarnya (unsurnya): **ketersediaan, akses,** dan **penyerapan**

- Sebagai dampak keeratannya, **gizi dan keberlanjutan pertanian** terbawa dalam kerangka persoalan.

Diversifikasi pangan

- Diversifikasi pangan adalah program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk juga mengonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsinya. Di Indonesia, diversifikasi pangan dimaksudkan agar masyarakat Indonesia tidak menganggap nasi sebagai satu-satunya makanan pokok yang tidak dapat digantikan oleh bahan pangan yang lain.
- Implementasi dari Diversifikasi Pangan melalui kegiatan:
  - (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), kemudian dikembangkan Pekarangan Pangan Lestari;
  - (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), kemudioan dikembangkan menjadi Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L); serta
  - (3) Sosialisasi, Promosi, dan Bimtek P2L.

    Melalui 3 (tiga) kegiatan besar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).

Tabel 1. CONTOH KASUS Diversifikasi Konsumsi Pangan di Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar

No	Jenis Pangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Beras	29	83
2	Beras+Jagung+Ubi Jalar+Singkong	6	17
Jumlah		35	100

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 1, bahwa diversifikasi konsumsi pangan masyarakat lebih banyak pada konsumsi beras yaitu 29 orang sedangkan untuk konsumsi beras,+jagung+ubi jalar+ singkong sebanyak 6 orang.

Sumber: Rahman, Rizka Mey Wulandari, Mais Ilsan, dan Ida Rosada. 2020. *Analisis Diversifikasi Konsumsi Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumahtangga Nelayan. Jurnal Agribisnis UMI. Makassar.*

Pola Konsumsi

- Pola konsumsi pangan adalah berbagai macam informasi yang memberikan gambaran mengenai **jenis, jumlah**, dan **frekuensi** bahan makanan yang dikonsumsi atau dimakan setiap hari oleh kelompok masyarakat tertentu (Baliawati, dkk. 2004) dalam jangka waktu tertentu (Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan, 2003).
- Situasi pangan di Indonesia cukup unik disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, tetapi juga adanya keragaman sosial, ekonomi, kesuburan tanah, dan potensi daerah (Hasan 1994).
- Tahun 1960-an, Pemerintah sudah menganjurkan konsumsi bahan-bahan pangan pokok selain beras (Rahardjo, 1993); dan
- Tahun 1974, Pemerintah juga mencanangkan kebijakan diversifikasi untuk lebih menganekaragamkan jenis pangan dan meningkatkan muti-gizi makanan masyarakat melalui Intruksi Presiden (Inpres) No. 14 dan disempurnakan pada Inpres No. 20 tahun 1979.

Tabel 2. CONTOH KASUS Pola Konsumsi Pangan Berdasarkan Kriteria

No	Pola Konsumsi Pangan	Kriteria	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	PU+L Atau PU+S	Tidak Lengkap (1)	4	11
2	PU+L+S	Kurang Lengkap (2)	24	69
3	PU+L+S+B Atau PU+L+S+B+S1	Lengkap (3)	7	20
	Jumlah		35	100

Sumber: Data Primer, 2018

Keterangan:
- PU= Pangan Utama (Beras, Ubi, Jagung)
- L= Lauk Pauk
- S= Sayur-sayuran
- B= Buah-buahan
- S1= Susu

Berdasarkan tabel 2, rata-rata responden dengan pola konsumsi PU + L + S sebanyak 24 responden (60%) dengan kriteria mengkonsumsi pangan secara kurang lengkap dan responden dengan pola konsumsi PU + L + S + B atau PU+L+S+B+S1, sebanyak 7 orang (20 %) dengan kriteria mengkonsumsi pangan secara lengkap.

Sumber: Rahman, Rizka Mey Wulandari, Mais Ilsan, dan Ida Rosada. 2020. *Analisis Diversifikasi Konsumsi Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah tangga Nelayan. Jurnal Agribisnis UMI. Makassar.*

POLA KONSUMSI PANGAN

Ketahanan pangan dan gizi seimbang

- Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidak stabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya.
- Penilaian ketahanan pangan:
  - Keswadayaan atau keswasembada perorangan *(self-sufficiency),* dan
  - Ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko. Meski berbagai negara sangat menginginkan keswadayaan secara perorangan untuk menghindari risiko kegagalan transportasi, namun hal ini sulit dicapai di negara maju karena profesi masyarakat yang sudah sangat beragam

dan tingginya biaya produksi bahan pangan jika tidak di industrialisasikan.

- *World Health Organization* (WHO): tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu
  - **ketersediaan pangan,** kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar.
  - **akses pangan,** kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi
  - **pemanfaatan pangan** kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.

Tabel 3. CONTOH KASUS Ketersediaan Pangan Rumah Tangga di Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Tahun 2018

No	Jenis Pangan RT	Ketersediaan Pangan		Jumlah (Orang)
		Beli (0)	Hasil (1)	
1	Pangan Utama			
	a. Beras	7	28	35
	b. Jagung	18	17	35
	C. Ubi Jalar	35	0	35
	d. Singkong	35	0	35
2	Pangan Lainnya			
	a. Udang	15	20	35
	b. Ikan	0	35	35
	c. Kangkung	35	0	35
	d. Pisang	35	0	35

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 3, ketersediaan pangan masyarakat lebih banyak membeli pangan dibanding dengan hasil produksi sendiri.

Sumber : Rahman, Rizka Mey Wulandari, Mais Ilsan, dan Ida Rosada. 2020. *Analisis Diversifikasi Konsumsi Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah tangga Nelayan. Jurnal Agribisnis UMI. Makassar.*

KETERSEDIAAN PANGAN

Potret ketahanan pangan Kota Makassar tahun 2019-2021

- **KETERSEDIAAN PANGAN**: kebanyakan status rata-rata disusul dengan rentan dan waspanda spanjang tahun selama tiga tahun.

KETERSEDIAAN PANGAN

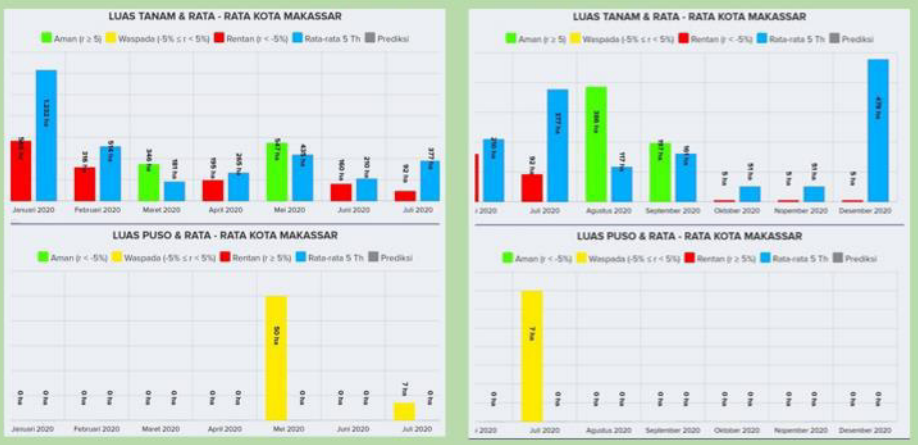

Tahun 2020

Sumber: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

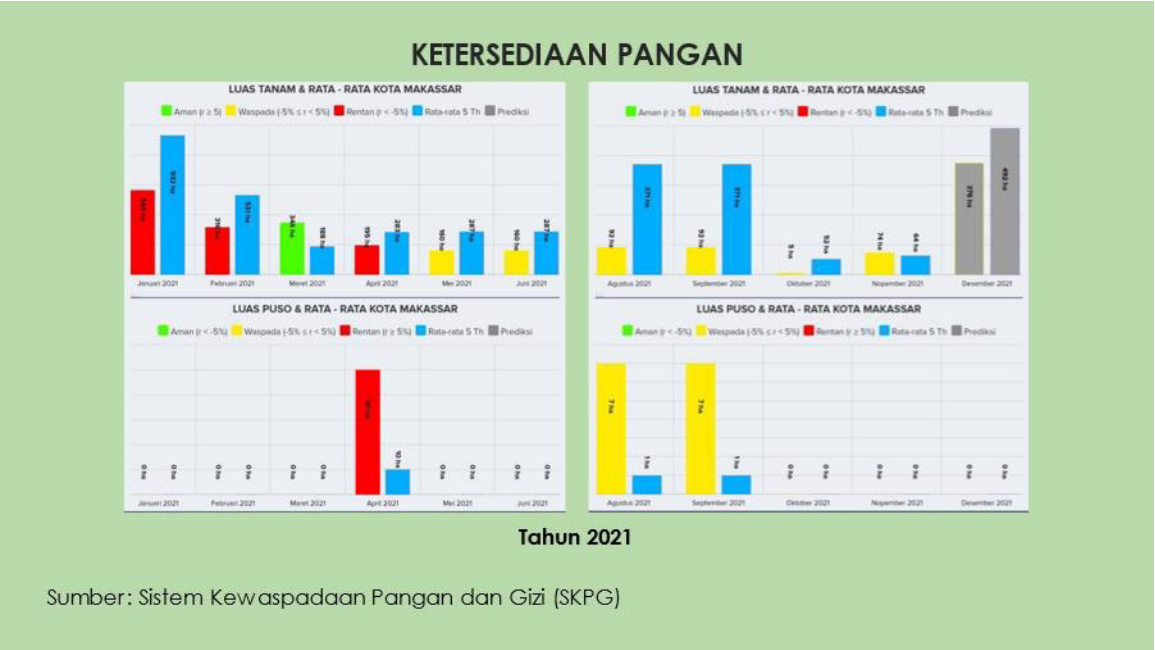

Sumber: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan di Kota Makassar dapat dilihat melalui luas tanam yang tersedia serta luas puso yang masih ada. Pada tahun 2021, luas tanam pada bulan Januari yaitu 565 ha, bulan Februari yaitu 316 ha, dan bulan April yaitu 195 ha berada pada kategori rentan. Pada bulan Mei yaitu 160 ha, bulan Juni yaitu 160 ha, bulan Agustus yaitu 92 ha, bulan September yaitu 92 ha, bulan Oktober yaitu 5 ha, dan bulan November yaitu 74 ha berada pada kategori waspada. Pada bulan Maret yaitu 346 ha berada pada kategori aman. Sedangkan pada bulan Desember seluas 376 ha berada pada kategori prediksi.

Luas puso pada bulan April seluas 50 ha berada pada kategori rentan. Pada bulan Agustus dan September seluas 7 ha berada pada kategori waspada.

- **AKSES PANGAN**:
  - **BERAS**: aman sepanjang tahun selama 3 tahun
  - **JAGUNG**: aman sepanjang tahun selama 3 tahun kecuali januari-februari 2019
  - **GULA PASIR**: aman sepanjang tahun selama 3 tahun kecuali Des. 2019 dan Feb. 2020.

- **MINYAK GORENG**: aman sepanjang tahun selama 3 tahun kecuali Jul.-Des. 2021
- **DAGING AYAM**: aman sepanjang tahun selama 3 tahun kecuali Okt 2021.
- **TELUR**: aman sepanjang tahun selama 3 tahun kecuali Des. 2019 dan Feb. 2020.
- **PEMANFAATAN PANGAN:**

  Balita *underweight*: tidak ada, kebanyakan status rata-rata disusul aman.

  Akses pangan dapat diukur melalui dari harga pangan utama yang tersedia di Kota Makassar. Untuk tahun 2021, harga pangan yang diukur adalah beras, jagung, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, dan telur ayam.

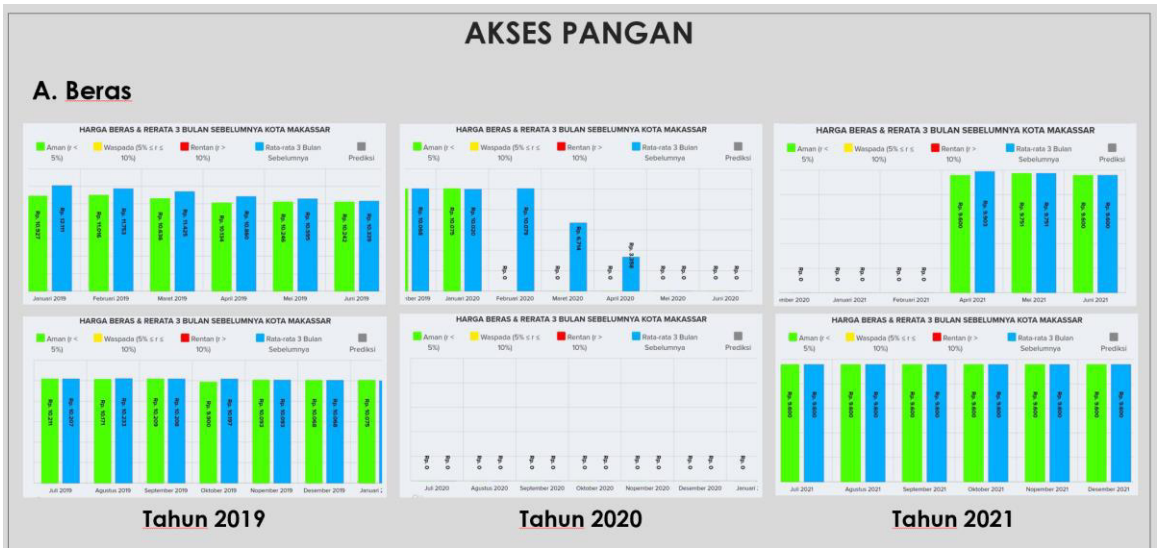

AKSES PANGAN

B. Jagung

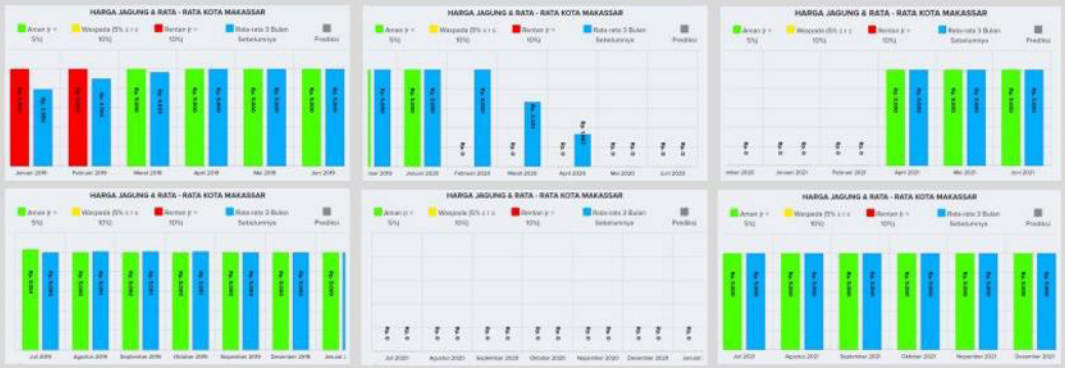

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Sumber: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

AKSES PANGAN

C. Gula Pasir

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Sumber: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

AKSES PANGAN

D. Minyak Goreng

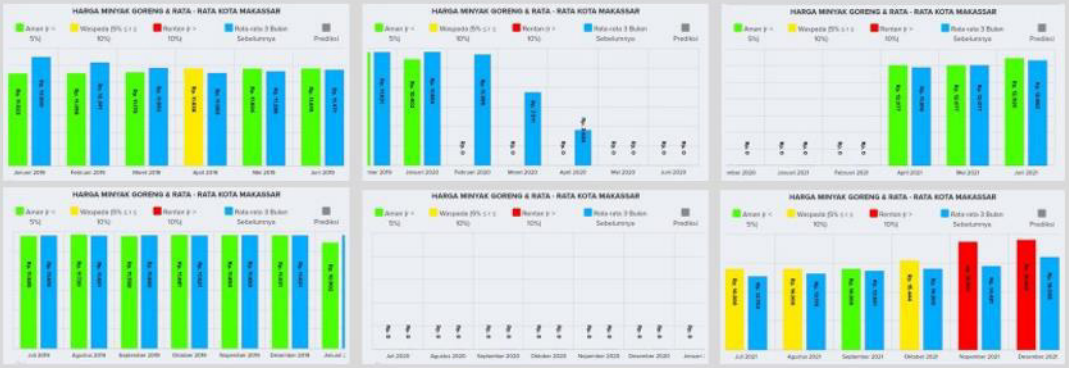

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Sumber: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

AKSES PANGAN

E. Daging Ayam

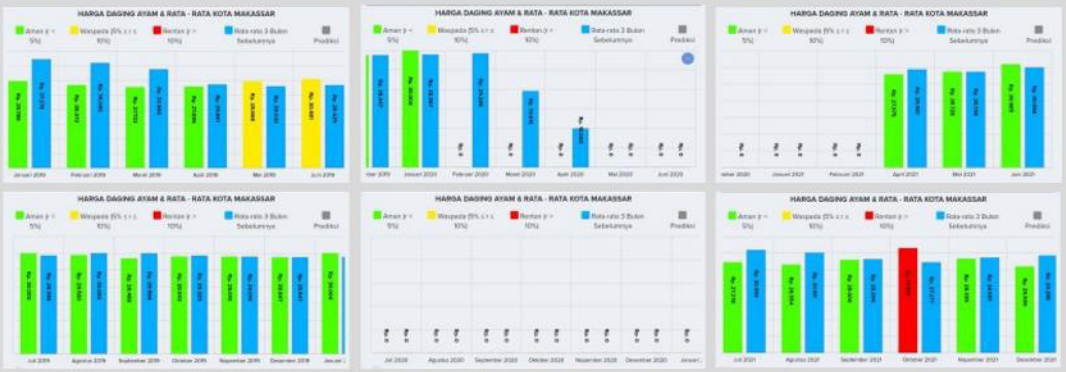

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Sumber: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

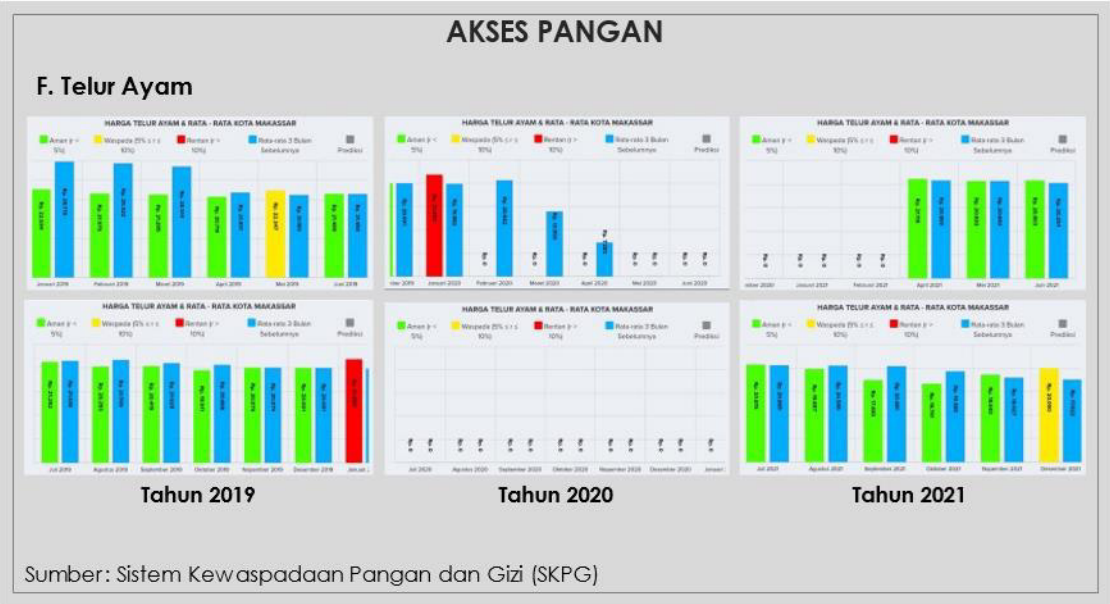

❑ **Pemanfaatan Pangan**

Pemanfaatan pangan diukur berdasarkan jumlah balita *underweight* dan total balita di Kota Makassar. Pada bulan Januari total balita sebanyak 983, dan jumlah balita *underweight* sebanyak 66 yang berada pada kategori aman. Pada bulan Februari dan Maret total balita sebanyak 54.321, dan jumlah balita *underweight* sebanyak 2.095 yang berada pada kategori aman. Pada bulan April total balita sebanyak 741, dan jumlah balita *underweight* sebanyak 23 yang berada pada kategori aman. Pada bulan Juni total balita sebanyak 1.517, dan jumlah balita *underweight* sebanyak 203 yang berada pada kategori aman. Pada bulan Juli total balita sebanyak 762, dan jumlah balita *underweight* sebanyak 52 yang berada pada kategori aman. Pada bulan Agustus total balita sebanyak 1.517, dan balita *underweight* sebanyak 203 yang berada pada kategori aman. Pada bulan September total balita sebanyak 1.059, dan balita *underweight* sebanyak 51 yang berada pada kategori aman. Pada bulan Oktober total balita sebanyak 2.063, dan jumlah balita *underweight* sebanyak 156 yang berada pada kategori aman. Pada bulan November total balita sebanyak 953, dan jumlah balita *underweight* sebanyak 113

yang berada pada kategori aman. Sedangkan pada bulan Desember total balita sebanyak 953, dan jumlah balita *underweight* sebanyak 113 yang berada pada kategori prediksi.

Sumber: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

PEMANFAATAN PANGAN

Tahun 2019

❑ **Kelurahan Prioritas 1 Atau Terindikasi Sangat Rentan Terhadap Kerawanan Pangan Dan Gizi**

No	Nama Kec	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	2. Rasio Sarana Pangan	3. Rasio Pddk Tdk Sejahtera	4. Akses Jalan	5.Rasio Tanpa Air Bersih	6. Rasio Pddk per Tenkes	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
1	KEPULAUAN SANGKARRANG	7371081	7371081001	KODINGARENG	1	1	3	1	4	31,89	153	1
2	KEPULAUAN SANGKARRANG	7371081	7371081002	BARRANG CADDI	1	1	4	1	2	49,34	151	1
3	KEPULAUAN SANGKARRANG	7371081	7371081003	BARRANG LOMPO	1	1	4	1	5	36,21	152	1
4	TAMALANREA	7371111	7371111004	KAPASA	4	3	3	2	2	51,09	150	1

Faktor yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 hasil analisis seluruh Kelurahan yang berada di Kota Makassar adalah :

1. Indikator Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Jumlah Rumah Tangga.
2. Indikator Rasio Jumlah Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Desil1 Terhadap Jumlah Penduduk masih tergolong tinggi.
3. Indikator Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan Jumlah Rumah Tangga yang dilayani.
4. Indikator Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan tergolong sediit dibandingkankan dengan Jumlah Penduduk dengan Kepadatan Penduduk yang dilayani.
5. Indikator Kelurahan Tanpa Akses Sarana Transportasi Yang Memadai Baik Melalui Darat, Air atau Udara belum dapat dilalui sepanjang tahun.

❑ **Kelurahan Prioritas 2 Atau Terindikasi Rentan Terhadap Kerawanan Pangan Dan Gizi**

No	Nama Kec	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	2. Rasio Sarana Pangan	3. Rasio Pddk Tdk Sejahtera	4. Akses Jalan	5.Rasio Tanpa Air Bersih	6. Rasio Pddk per Tenkes	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
1	TALLO	7371090	7371090015	LAKKANG	2	1	4	1	1	57,13	148	2
2	BIRINGKANAYA	7371110	7371110011	SUDIANG	4	4	4	3	1	52,37	149	2

Faktor yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan untuk prioritas 2 hasil analisis seluruh kelurahan yang berada di Kota Makassar adalah :

1. Indikator Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk dengan Kepadatan Penduduk yang dilayani
2. Indikator Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah desil1 terhadap jumlah penduduk masih tergolong tinggi
3. Indikator rasio rumah tangga tanpa akses air bersih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Jumlah Rumah Tangga
4. Indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang dilayani.

❑ **Kelurahan Prioritas 3 Atau Terindikasi Agak Rentan Terhadap Kerawanan Pangan Dan Gizi**

No	Nama Kec	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	2. Rasio Sarana Pangan	3. Rasio Pddk Tdk Sejahtera	4. Akses Jalan	5.Rasio Tanpa Air Bersih	6. Rasio Pddk per Tenkes	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
1	TAMALATE	7371030	7371030001	BAROMBONG	3	1	4	1	1	60,05	146	3
2	UJUNG TANAH	7371080	7371080012	CAMBAYA	2	1	4	3	2	59,14	147	3
3	BIRINGKANAYA	7371110	7371110004	PACCERAKKANG	1	2	4	1	2	60,32	145	3
4	BIRINGKANAYA	7371110	7371110013	UNTIA	2	1	4	1	1	60,43	144	3

Untuk Prioritas 3, faktor khusus yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan berdasarkan hasil analisis seluruh Kelurahan yang berada di Kota Makassar adalah :

1. Indikator Rasio Jumlah Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Desil1 masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk;
2. Indikator Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Jumlah Rumah Tangga
3. Indikator Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk dengan Kepadatan Penduduk yang dilayani
4. Indikator Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan masih sedikit jika dibandingkan dengan Jumlah Rumah Tangga yang dilayani.

❑ **Perbandingan Hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Makassar Tahun 2020 Dan 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Tiap Prioritas					
		Prioritas 1		Prioritas 2		Prioritas 3	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	MARISO	0	0	0	0	0	0
2	MAMAJANG	0	0	0	0	0	0
3	TAMALATE	0	0	1	0	1	1
4	RAPPOCINI	0	0	0	0	0	0
5	MAKASSAR	0	0	0	0	0	0
6	UJUNG PANDANG	0	0	0	0	0	0
7	WAJO	0	0	0	0	0	0
8	BONTOALA	0	0	0	0	0	0
9	UJUNG TANAH	0	0	0	0	2	1
10	KEP. SANGKARRANG	1	3	0	1	2	0
11	TALLO	0	0	1	0	0	0
12	PANAKKUKANG	0	0	0	0	0	0
13	MANGGALA	0	0	0	0	0	0
14	BIRINGKANAYA	0	0	1	1	2	2
15	TAMALANREA	1	1	0	0	0	0
JUMLAH		2	4	3	2	7	4

❑ **Aksi yang dapat dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan di Kota Makassar**

No	Program/Aksi	Pelaku (tetantif)
1	Meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan daya guna lahan (ruang terbuka hijau, RTH) perkotaan dalam program "**Kota Makassar mandiri pangan melalui *urban farming***" (UU 26/2007, 30% RTH dari luas wilayah; 20% public, 10% privat)	Masyarakat, Pemerintah, Kampus, LSM (lembaga swadaya masyarakat)
2	**Gerakan percepatan diversifikasi**	Masyarakat,

No	Program/Aksi	Pelaku (tetantif)
	pangan lokal melalui pembiasaan makan pangan *alternative* lokal (sagu, umbi-umbian) (Gerakan "*One Day No Rice, sukses di Depok*")	Pemerintah, Kampus, LSM (lembaga swadaya masyarakat)
3	Gerkan/Pendidikan pola makan tidak boros (Selama 20 tahun terakhir sekitar 23-48 juta ton/tahun *food loss and waste*, Pidato pengukuhan Prof. Dr. Ir. Nurmahmudi, M.Sc. Agustus 2021)	Masyarakat, Pemerintah, Kampus, LSM (lembaga swadaya masyarakat)
4	Penguatan infrastruktur pangan berupa gudang cadangan pangan, dan permodalan usaha *urban farming*	Pemerintah dan sektor swasta
5	Penguatan industri pengolahan pangan untuk mendukung pemanfaatan pangan	Pemerintah, Kampus/SMK terkait, dan LSM (lembaga swadaya masyarakat)
6	Penyuluhan dan pendampingan terkait program pendukung penyediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan	Pemerintah, Kampus/SMK terkait, dan LSM (lembaga swadaya masyarakat)
7	Penguatan Sistem Informasi menunjang pendidikan/sosialisasi terkait ketiga program pokok	Pemerintah, Kampus/SMK terkait, dan LSM (lembaga swadaya masyarakat)

Hasil Koordinasi Keberlanjutan Sistem Pangan dan Gizi

1. Indeks Ketahanan Pangan didasarkan pada:
   a. hasil *review* terhadap indeks ketahanan pangan global;
   b. tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi;
   c. keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan
   d. ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (bulanan/tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota

2. Menurut WHO, ketahanan pangan memiliki 3 komponen utama yaitu:
   a. **ketersediaan pangan,** kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar.
   b. **akses pangan,** kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi
   c. **pemanfaatan pangan** kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.
   d. FAO menambahkan komponen **keempat, yaitu kestabilan** dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang.

3. Sembilan Indikator Ketahanan Pangan
   a. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar; *KN = 300 g/kap/hr*);
   b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (<Rp/bln);
   c. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran;
   d. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik (terkait pekerjaan);
   e. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun;
   f. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih (a. minum dr leding/PAM, mata air, sumur > 10 m jarak dgn jamban);
   g. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk (*dokter – ketkdis*);
   h. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*) ((Standar WHO, 2005); dan
   i. Angka harapan hidup pada saat lahir.

4. Bobot indikator ketahanan pangan kabupaten dan kota berdasarkan *expert judgement.*

No.	INDIKATOR	Kabupaten	KOTA
ASPEK KETERSEDIAAN		**0.30**	**-**
1	Ratio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	0.30	-
ASPEK KETERJANGKAUAN		**0.30**	**0.45**
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0.15	0.20
3	Persentasi rumah tangga dgn proporsi pengeluaran utk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0.075	0.125
4	Persentase RT tanpa akses listrik	0.075	0.125
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		**0.40**	**0.55**
5	Rata-rata lama sekoah perempuan di atas 15 tahun	0.05	0.08
6	Persentase RT tanpa akses ke air bersih	0.15	0.18
7	Ratio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tkt kepadatan penduduk	0.05	0.08
8	*Prevalence* Balita *stunting*	0.05	0.08
9	Angka harapan hidup pada saat lahir	0.10	0.13
	TOTAL 1 (100%)	**1.00**	**1.00**
Sumber: BKP Kementan 2019. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018			

5. *Global Food Security Index (GFSI)* Tahun 2020 menunjukkan Indonesia menempati peringkat 69 dari 113 negara didunia yang diukur. Sedangkan Kota Makassar menempati peringkat 17 kota dengan indeks ketahanan pangan terbaik di Indonesia.

6. Kebijakan perencanaan pangan mengacu kepada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan dengan mempertimbangkan skala prioritas contohnya:
   a. Ketersediaan:
      - Pemanfaatan lahan potensial (tidur dan pekarangan)
      - Infrastruktur (gudang Dolog)
      - Inovasi produksi dan pengolahan produk
   b. Keterjangkauan
      - Peningkatan distribusi
      - Perdagangan antar daerah
      - Jaga stabilitas harga
      - Membantu daya beli melalui perbaikan ekonomi dan subsidi
      - Pengembangan jarring social.
   c. Pemanfaatan
      - Mengedukasi pemenuhan gizi
      - Pengendalian dan pengolahan food waste

- Mendorong kesadaran Ibu menyusui sesuai anjuran
- Ketrampilan mengolah pangan
- Perbaikan sanitasi
- Pengolah tata air utk air bersih
- Menjaga penyaluran informasi melalui sistem informasi
- Mengaktifkan kelembagaan terkait pangan
- Mengembangkan konsumsi pangan lokal bergizi (contoh sagu)

7. Rekomendasi aksi untuk tata kelola sistem pangan dan gizi adalah Kebijakan tata kelola harus **berbasis rekomendasi** instansi teknis berwenang; dan melalui analisis/studi yang sesuai (misalnya: neraca pangan), serta:
   a. Menurunkan luasan lahan tidur; meningkatkan indeks tanam
   b. Mengembangkan tanaman bernilai ekonomi tinggi (**efisiensi air**): "*Film Biopor*"
   c. Mengembangkan kerja sama antar Pemerintah-LSM untuk memberi pelayanan/bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan (tepat sasaran)
   d. Memasyarakatkan budaya **"makan habis"** (tanpa sisa dengan konsekuensinya/disinsentif) — KS Pengelola sampah
   e. Pemetaan budaya/kebiasaan makan guna mendapatkan informasi akurat dan menjadikan instrument pemantauan
   f. Pendampingan ibu-ibu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai upaya meningkatkan produksi dan kualitas olahan (nilai tambah).

8. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) tahun 2021-2024 memiliki 4 Tujuan Strategis beserta programnya yaitu:
   a. Peningkatan **Ketersediaan** Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
      - Peningkatan produksi pangan yang beragam;
      - Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);
      - Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
      - Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*); dan
      - Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi.

   b. Peningkatan **Keterjangkauan** Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
      - Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
      - Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan;

- Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
- Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;
- Penyediaaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;
- Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; dan
- Pengembangan sistem logistik pangan.

c. Peningkatan **Pemanfaatan** Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)
   - Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;
   - Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;
   - Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
   - Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;
   - Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;
   - Pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;
   - Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
   - Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*);
   - Fortifikasi pada pangan tertentu; dan
   - Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.

d. Penguatan **Kelembagaan** dan Tata Kelola Pangan dan Gizi
   - Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah;
   - Penguatan peran sekton non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah;
   - Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi;
   - Penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi; dan
   - Penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.

9. Hasil identifikasi 4 tujuan strategis adalah

TS #1 – Ketersediaan

No	Usulan Aksi	Keberadaan Aksi Saat ini	OPD yang Terlibat
1	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	DP 2 (Dinas Perikanan dan Pertanian)
2	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	DP2 (Dinas Perikanan dan Pertanian)
3	Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Sudah ada dan berjalan dengan baik	DP2 (Dinas Perikanan dan Pertanian)
3	Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Sudah ada dan berjalan dengan baik	DP2 (Dinas Perikanan dan Pertanian), BP3A, BPM
4	Meningkatkan kerja sama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Sudah ada dan berjalan dengan baik	DKP, BPOM, Kepolisian, Dinas Perdagangan
5	Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Sudah ada dan berjalan dengan baik	DKP, Dinkes, BPOM
6	Menguatkan kapasitas pengawasan bagi OPD yang bertanggungjawab terhadap keamanan pangan asal hewan	Sudah ada dan berjalan dengan baik	DP2, BPOM, MUI
7	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan kota	Sudah ada dan berjalan dengan baik	Bulog/Dolog

No	Usulan Aksi	Keberadaan Aksi Saat ini	OPD yang Terlibat
8	Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat	Belum ada	DKP, DP2
9	Mengembangkan pertanian modern (*smart farming*) untuk mengurangi *food loss*	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	DP2 (Dinas Perikanan dan Pertanian)
10	Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Sudah ada dan berjalan dengan baik	DP2 (Dinas Perikanan dan Pertanian)
11	Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian *food loss* melalui peningkatan kapasitas	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	DP2, Bulog
12	Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan *food loss*	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	DP2, DKP, Bulog
13	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan	Belum ada	DP2, Bulog

TS #2 – Keterjangkauan

No	Usulan Aksi	Keberadaan Aksi Saat ini	OPD yang Terlibat
1	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai *early warning system (EWS)* tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Sudah ada dan berjalan dengan baik	DKP, Dinas Perdagangan, DP2
2	Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribuskan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal	Belum ada, yang ada hanya di tingkat provinsi	DKP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi

No	Usulan Aksi	Keberadaan Aksi Saat ini	OPD yang Terlibat
3	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Sudah ada dan berjalan dengan baik	DKP, Dinas Perdagangan, DP2
3	Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan	Belum ada	Dinas Perdagangan, DKP, Bulog, DP2
4	Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	DKP, DP2, Dinkes, BPOM
5	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)		
6	Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/BPNT		
7	Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	Perwakilan peserta dari Dinas Sosial tidak hadir sehingga usulan tidak ada OPD yang proses. Tindak lanjut: usulan hendaknya dibahas kembali saat penyusunan RAD-PG	
8	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerja sama dengan *supplier* bahan pangan lokal di daerah masing-masing	Sudah ada dan berjalan dengan baik	DKP, Bulog
9	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam	Sudah ada dan berjalan	DKP, DP2, Dinas

No	Usulan Aksi	Keberadaan Aksi Saat ini	OPD yang Terlibat
	mengolah pangan lokal	dengan baik	Koperasi, Dinkes
10	Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Sudah ada dan berjalan dengan baik	DKP, Dinkes, BPS
11	Mengembangkan kerjasama industri start up dengan kelompok tani untuk distribusi pangan melalui jalur *e-commerce*	Sudah ada dan berjalan dengan baik	Dinas Perdagangan, DKP, Sektor Swasta

TS #3 – Pemanfaatan

No	Usulan Aksi	Keberadaan Aksi Saat ini	OPD yang Terlibat
1	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) beserta pemanfaatannya	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
2	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
3	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan	Sudah ada tapi belum berjalan dengan baik	DKP, Dinas Ketahanan Pangan
3	Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	Dinkes, Diskominfo, DKP
4	Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Sudah ada tapi belum berjalan dengan baik	DP2, DKP, Dinas Pendidikan, BPM, Diskominfo

No	Usulan Aksi	Keberadaan Aksi Saat ini	OPD yang Terlibat
5	Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
6	Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	Dinkes, Dinas Kominfo, BP3A, Dinas KB, Disdik, Kemenag, Dinsos,
7	Melakukan kerjasama dengan *influencer*, tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku	Belum ada	Dinas Kominfo, DKP, DP2, Dinkes, BPOM
8	Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melaui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Sudah ada dan berjalan dengan baik	Dinkes, Dinas Kominfo, Pemerintah Kelurahan
9	Melakukan *orientasi agent of change* pencegahan penyekit tidak menular (PTM)	Belum ada	Dinkes
10	Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
11	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	

No	Usulan Aksi	Keberadaan Aksi Saat ini	OPD yang Terlibat
12	Meningkatkan Sosialiasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Sudah ada dan berjalan dengan baik	Dinkes, Disdik, BPOM
13	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota	Belum ada	Dinkes, DKP, Bappeda
14	Melakukan advokasi untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	Dinkes, Kemenag, Diskominfo, Disnaker, BP3A, Bappeda
15	Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
16	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024	Sudah ada dan berjalan dengan baik	Dinkes, Diknas, Kemenag, Bappeda
17	Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan	Sudah ada dan berjalan dengan baik	Dinkes, Dinas KB, Tim PKK, Bappeda
18	Memperluas implementasi pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan	Sudah ada dan berjalan dengan baik	Dinkes, Dinas KB, Tim PKK, Bappeda
19	Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
20	Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM	Sudah ada dan berjalan dengan baik	Dinkes
21	Meningkatkan peran pemerintah daerah	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan	

No	Usulan Aksi	Keberadaan Aksi Saat ini	OPD yang Terlibat
	dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa	RAD-PG	
22	Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 terhadap pedoman yang berkaitan dengan perbaikan gizi yang diterbitkan pemerintah pusat yang digunakan di daerah	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
23	Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
24	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi *food waste*	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
25	Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan *imperfect*	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
26	Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan *food waste*	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
27	Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan *food waste*	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	Diskominfo, DKP
28	Melaksanakan Pengawasan terpadu dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi	Perwakilan peserta dari BPOM tidak hadir sehingga usulan tidak ada OPD yang proses. Usulan hendaknya dibahas kembali saat penyusunan RAD-PG	
29	Meningkatkan pembinaan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya		
30	Meningkatkan pembinaan sekolah terkait Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	Dinkes, Diknas, BPOM

TS #4 – Kelembagaan dan Tata Kelola

No	Usulan Aksi	Keberadaan Aksi Saat ini	OPD yang Terlibat
1	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan *stunting*	Belum ada	Bappeda, Dinkes, DKP, Disdik
2	Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *stunting* (aksi #2)	Belum ada	Bappeda, Dinkes, DP2, DKP, tim PKK
3	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam *scaling up* program pangan dan gizi	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	Bappeda, Dukcapil, Dinkes, Disdik
3	Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komuniakasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, *food loss* dan *food waste*.	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	Dinas perdagangan, DKP, Bappeda
4	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
5	Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
6	Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	

No	Usulan Aksi	Keberadaan Aksi Saat ini	OPD yang Terlibat
7	Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku	Sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik	Dinkes, Dinas KB
8	Mendorong penerbitan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Belum ada	DP2, Pertanahan, Bagian Hukum, Kecamatan
9	Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, *acceptibilitas*, harga, *shelf live*) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
10	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan *food loss* dan *food waste* termasuk inovasi *smart farming*	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
11	Mengembangkan *community based data* untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro di kota Makassar	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
12	Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
13	Menyelenggarakan forum daerah penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	
14	Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	Tidak dipilih peserta, dan usulan ini hendaknya dibahas saat penyusunan RAD-PG	

10. Telah disepakati pada forum bersama untuk melakukan pemetaan OPD, pelaksanaan tugas dan fungsinya serta akan menerbitkan Surat Keputusan Walikota.

B. Pemetaan Tugas dan Fungsi OPD

Pemetaan Tugas dan Fungsi OPD dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Dinas (OPD)	Bidang/Sub Bidang/Seksi	Peningkatan Keterdiaan Pangan	Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Pemanfaatan Pangan	Penguatan Kelembagaan
Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda)	Bidang ekomomi dan Sosial Budaya.	(R, P)	(K, R)	(K, R)	(K, R, P)
Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perikanan dan Pertanian	Bidang Pangan: Seksi Ketahanan Pangan	(K, R, P)	(K, R, P)	(K, P)	(R,P)
	Bidang Perikanan dan Kelautan: Seksi Perikanan Tangkap; Seksi Perikanan Budidaya	(K, R, P)	(K, R, P)	(K, R, P)	(R,P)
	Bidang Pertanian : Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan	(K, R, P)	(K, R, P)	(K, R, P)	(R,P)
	Bidang Peternakan dan Penyuluhan	(K, R, P)	(K, R, P)	(K, R, P)	(R,P)
Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi: Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	(R, P)	(R,P)	(R, P)	(R,P)

Dinas (OPD)	Bidang/Sub Bidang/Seksi	Peningkatan Keterdiaan Pangan	Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Pemanfaatan Pangan	Penguatan Kelembagaan
	Bidang Sumber Daya Kesehatan: Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman	(R, P)	(R, P)	(R, P)	(R, P)
Dinas Perdagangan	Bidang Distribusi, membawahi: 1.Seksi Pengendalian Distribusi; 2. Seksi Sarana Distribusi dan Logistik	(R, P)	(R, P)	(R, P)	(R, P)
Dinas Pendidikan	Pemberian makanan tambahan bagi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	(R, P)	(R, P)	(R, P)	(R, P)
Dinas Sosial	Terdapat tugas khusus Tentang Pedoman Pemberian Permakanan	(R, P)	(R, P)	(R, P)	(R, P)
Dinas Perumahan dan Permukiman	Bidang Perumahan dan Permukiman	(R, P)	(R, P)	(R, P)	(R, P)
Dinas Kebersihan dan Pertanaman	Bidang Kebersihan	(R, P)	(R, P)	(R, P)	(R, P)
Dinas Komunikasi dan Informasi	Bidang Informasi	(R, P)	(R, P)	(R, P)	(R, P)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Bidang Pemberdayaan Perempuan	(R, P)	(R, P)	(R, P)	(R, P)

Dinas (OPD)	Bidang/Sub Bidang/Seksi	Peningkatan Keterdiaan Pangan	Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Pemanfaatan Pangan	Penguatan Kelembagaan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					

*K=Koordinator, R= Regulator, P=Pelaksana

Sasaran Kinerja Tahun 2022-2024

Impact		
Peningkatan Kualitas SDM ***Outcome*:** • Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) mencapai • Prevalensi balita *stunting* pendek mencapai < 20,00% dan Sangat Pendek mencapai < 20,00% • Prevalensi balita *Wasting* Kurus mencapai < 5,00% dan sangat kurus mencapai < 5,00% • Prevalensi Balita Obesitas < 10% • ASI eksklusif mencapai > 80% • Angka Kematian Bayi mencapai 10 per 1.000 kelahiran bayi • Angka Kematian Ibu mencapai 53 per 100.000 kelahiran hidup		
OPD/Instansi Pelaksana	**Input**	***Output***
Dinas Kesehatan	• Penyediaan peta informasi gizi masyarakat • Gerakan percepatan penurunan *stunting* • Surveilans Gizi • Pemantauan Status Gizi	Konsumsi energi dan zat gizi tercukupi terutama bagi kelompok rentan yaitu bayi, balita, anak sekolah, wanita

	di sekolah • Pendampingan Kasus Gizi Buruk • Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan • Peningkatan Petugas Konselor ASI bagi Petugas Kesehatan • Pemberian Mineral Mix di RSU • Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita, Anak Sekolah dan Ibu Hamil • Penyediaan Pemberian tablet tambah darah bagi wanita usia subur dan Ibu Hamil dan Remaja • Penyediaan Pemberian kapsul Vitamin A bagi bayi,balita dan Ibu nifas • Penyediaan MP-ASI • Pelatihan Pemantauan timbang bagi petugas gizi	usia subur, Ibu hamil dan nifas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	• Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai SPM • Jumlah sekolah representatif yang disediakan • Jumlah laboratorium representatif yang tersedia • Jumlah kantin sehat dan jujur yang disediakan • Jumlah UKS mandiri yang disediakan • Jumlah Sarana Olahraga	Meningkatnya keikutsertaan, pengetahuan dan kepedulian peserta didik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana sekolah penunjang akses pangan dan dan gizi berimbang

	yang *representative* • Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan hidup	
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	• Jumlah Forum Anak Daerah • Jumlah masalah perempuan dan anak yang ditangani masalahnya • Jumlah regulasi yang berpihak terhadap kesejahteraan perempuan dan anak yang diterbitkan • Jumlah kampung KB	Meningkatnya sarana dan prasarana serta regulasi untuk menunjang kesejahteraan perempuan dan anak
Dinas Sosial	• Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan • Jumlah regulasi peningkatan kesejahteraan sosial yang disediakan	Meningkatnya sarana dan prasarana serta regulasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial
Bappeda	• Jumlah rapat/ rakor/ bimtek/ sosialisasi/ pelatihan yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan • Jumlah kajian/perencanaan terkait gizi dan pangan yang disediakan	Tersususnya dokumen perencanaan yang sinergis
Dinas Komunikasi dan Informasi	• Jumlah promosi/iklan yang mendukung peningkatan gizi dan pangan yang disediakan • Jumlah dokumen/berita yang mendukung peningkatan gizi dan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait gizi dan pangan melalui informasi media yang disediakan KOMINFO

	pangan yang disediakan	
Badan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	• Jumlah kader posyandu terlatih • Jumlah posyandu aktif dalam Bina Balita • 10 Program pokok PKK • Jumlah Badan usaha tingkat kelurahan yang mandiri	Meningkatnya kelurahan sehat, aparatur kelurahan sehat dan melalui perberdayaan masyarakat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP elektronik, KK) Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (akte nikah, akte kelahiran, akte kematian, dll)	Meningkatnya kepemilikan kependudukan (KTP-E, KK) dan dokumen pencatatan sipil sebagai syarat untuk memperoleh program perlindungan sosial yang disediakan pemerintah
Dinas Perumahan dan Permukiman	• Jumlah air bersih yang disediakan • Jumlah air minum layak yang disediakan • Jumlah sanitasi layak yang disediakan • Jumlah rumah layak huni yang disediakan	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan gizi dan pangan
Dinas Pertanian dan Pangan	• Peningkatan produksi Padi • Peningkatan produksi jagung • Peningkatan produksi daging • Pengembangan ketersediaan pangan pokok karbohidrat dan protein • Pengembangan lumbung pangan • masyarakat	Ketersediaan Pangan, Akses Ekonomi dan Pemanfaatan Pangan

	• Peningkatan dan pengembangan • penganekaragaman konsumsi pangan • Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan) • Pengembangan makanan tradisional pangan lokal • Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan • Pengembangan bibit unggul • Peningkatan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	